



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN TRIWULAN

3

2023

LAPORAN 3 TRIWULAN 2023



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2022	5
II. Progres dan Capaian	10
A. Progres Proyek	11
1. COREMAP–CTI Asian Development Bank	11
2. Blue Carbon	19
3. Blue Finance	22
4. Aquaculture / ISLME	28
B. Program Strategis, Potensi Kerja Sama, dan Penggalangan Dana	29
C. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan	34
III. Audit, Keuangan dan Operasional	38
A. Audit BPK Tahun 2023	38
B. Informasi Keuangan Periode Juli - September 2023	38
C. Operasional / Kesekretariatan	39



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini

ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Pada periode kuartal ketiga tahun 2023 ini, salah satu kegiatan utama ICCTF adalah penutupan dan diseminasi hasil proyek COREMAP-CTI ADB. Dengan kegiatan ini maka proyek COREMAP-CTI ADB telah secara resmi berakhir. Beberapa proyek lain yang tidak kalah penting dan saat ini masih berjalan di ICCTF antara lain adalah Blue Carbon dengan AFD, LAUTRA dengan World Bank, dan Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME) dengan ADB. Project-project tersebut saat ini tengah dalam persiapan menuju tahap implementasi. Selain proyek-proyek tersebut, juga terdapat beberapa *project pipeline* yang sedang disiapkan oleh ICCTF meliputi rapat-rapat koordinasi terkait inisiasi blue finance dan proyek Coral Bond.

1

RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2023



Q1
JAN – MAR

Pengelolaan Proyek

Kegiatan Pendukung Hibah Existing

- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project

Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline

- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture

Kegiatan Audit

- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI Asian Development Bank
- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI World Bank

Dukungan Operasional

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan

Dukungan Personil ICCTF

- Konsultan & Jasa Lainnya

Q2
APR – JUN

Pengelolaan Proyek

Kegiatan Pendukung Hibah Existing

- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project

Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline

- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture

Kegiatan Audit

- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI Asian Development Bank
- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI World Bank

Perencanaan Dampak Climate Change sebagai Input untuk RPJMN 2025 - 2029

- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana

Kegiatan Komunikasi Outreach

- Partisipasi dalam Event Perubahan Iklim

Dukungan Operasional

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan

Dukungan Personil ICCTF

- Konsultan & Jasa Lainnya

Q3
JUL - SEP

Pengelolaan Proyek

- **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**
- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project
- **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**
- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture
- **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai input untuk RPJMN 2025 - 2029**
- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana

- **Kegiatan Komunikasi Outreach**
- Partisipasi dalam Event Perubahan Iklim
- Produksi Publikasi Komunikasi
- **Penggalangan Dana Internasional**
- UN 2023 Water Conference – New York

Dukungan Operasional

- **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat MWA
- Rapat Penyusunan Laporan
- **Dukungan Personil ICCTF**
- Konsultan & Jasa Lainnya

Q4

OCT - DEC

Pengelolaan Proyek

- **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project
- **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**
- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture
- **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai input untuk RPJMN 2025 - 2029**
- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana

- **Kegiatan Komunikasi Outreach**
- Produksi Publikasi Komunikasi
- **Penggalangan Dana Internasional**
- 2023 UN Climate Change Conference (UNFCCC COP 28)

Dukungan Operasional

- **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan
- **Dukungan Personil ICCTF**
- Konsultan & Jasa Lainnya



2

PROGRES dan
CAPAIAN

1. COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK

a. Workshop Exit Strategy COREMAP-CTI ADB di Provinsi NTB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 di Senggigi, NTB. Agenda pertemuan ini adalah penyampaian exit strategy COREMAP-CTI ADB di Provinsi NTB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Semua stakeholder diharapkan dapat berkomitmen untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga sarana dan prasana yang ada serta dapat terus melakukan pendampingan terhadap program yang sudah dilaksanakan
 - Semua stakeholder dapat melakukan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, agar dampak dari proyek dapat dirasakan secara berkesinambungan
- Strategi keberlanjutan:
 1. Penguatan kapasitas SDM dalam kelompok masyarakat Pokdarwis, Poklahsar, dan Pokmaswas di Gili Matra maupun Gili Balu, dalam mengelola asset yang telah diberikan dan mengakses pendanaan berkelanjutan untuk keberlangsungan kegiatan
 2. Melakukan koordinasi dengan BKKPN Kupang dan Pemda untuk dapat mengintegrasikan hasil kegiatan proyek ke dalam rencana kerja dan rencana pengelolaan kawasan untuk menjamin keberlanjutan
 3. Mengintegrasikan kegiatan COREMAP-CTI dengan kegiatan pada K/L (pembinaan, bantuan pemerintah)



Gambar 1.
Workshop Exit
Strategy di
Provinsi NTB

b. Steering Committee Meeting COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 di Senggigi, NTB. Agenda pertemuan ini adalah Steering Committee meeting proyek COREMAP-CTI ADB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Laporan terkait capaian, rincian penyerapan dana dan perkembangan fisik dari aset telah disampaikan pada SC Meeting
 - Rencana zonasi perlu diselesaikan dan dituntaskan dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan
 - Closing project diagendakan di bulan Agustus
- Infrastruktur yang sudah diserahkan diharapkan pemanfaatannya menjadi perhatian oleh semua stakeholder
 - Tindak lanjut:
 1. Penyiapan lesson learned dan praktik baik untuk direplikasi
 2. Penguatan kapasitas melalui sertifikasi keahlian dalam pengelolaan kawasan konservasi
 3. Need assessment yang scopenya perlu disesuaikan terkait dengan waktu yang tersisa



Gambar 2. Steering Committee Meeting pembahasan COREMAP-CTI ADB

c. Penanaman Mangrove dan Pohon Cemara Laut di Gili Meno

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 di Gili Meno. Agenda pertemuan ini adalah penanaman vegetasi pantai. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan ini adalah aksi dari hasil kunjungan sebelumnya Menteri Bappenas ke Gili Matra yang memiliki kekhawatiran terhadap laju abrasi dan erosi di ketiga Gili.
- Kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dilakukan merupakan salah satu output dari program COREMAP-CTI ADB. Gili Meno dipilih sebagai lokasi penanaman karena memiliki struktur tanah yang baik. Kegiatan rehabilitasi sejenis lainnya telah dilakukan oleh mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB di lokasi lain dengan total 2,8 hektar ekosistem mangrove yang telah direhabilitasi
- Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat sekitar untuk dapat terus menjaga lingkungan sekitar pantai dan memperhatikan kelestariannya
- Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat terus mendukung upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir untuk keberlanjutan ekosistem dan aktivitas ekonomi masyarakat



Gambar 3. Penanaman vegetasi pantai di Gili Meno

d. Media Visit di Gili Matra dan Gili Balu

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14-17 Juli di Gili Matra dan Gili Balu. Agenda kegiatan ini adalah pengambilan footage oleh media di lokasi COREMAP-CTI ADB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Pengambilan footage di Gili Trawangan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023. Kondisi pos pengawasan Gili Matra masih dalam kondisi yang sangat baik, akan tetapi pengoperasiannya belum maksimal
- Pengambilan footage Pondok Informasi Ekowisata (PIE) di Teluk Nara dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023. Bangunan telah dilengkapi dengan peralatan operasional kantor dan Tourist Management System (TMS). Pengelola bangunan adalah Dinas Perhubungan dan sudah dilakukan serah Terima dari

Kementerian PPN/Bappenas kepada Dinas Perhubungan

- Pada tanggal 16 Juli 2023 dilakukan pengambilan footage landscape bukit mantar dan footage PIE GILI Balu. Tim juga melakukan peliputan proses pengolahan pembuatan stik rumput laut dan sambal gurita yang dilakukan oleh kelompok Poklashar
- Pada tanggal 17 Juli 2023 pengambilan footage hasil rehabilitasi mangrove di Pulau Namo serta Menara Pengawas di Pulau Namo dan Pulau Paserang. Hasil monitoring kondisi bangunan masih dalam kondisi yang sangat baik
- Tindak lanjut dari kegiatan media visit ini diharapkan tersedianya footage untuk publikasi dan diseminasi di media



Gambar 4.
Pengambilan footage
oleh media

e. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir (PCR)

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini adalah koordinasi pengambilan data dan informasi dalam penyusunan laporan PCR. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan laporan PCR ADB dimulai pada tanggal 21 Juli dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2023. Lokasi pertama yang dikunjungi yaitu Nusa Penida, Bali. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Gili Matra dan Gili Balu, Provinsi NTB. Setelah itu, dilakukan pertemuan dengan perwakilan Direktorat KKHL, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Juli 2023
- Tim Konsultan akan didampingi oleh tim PIU ADB dalam melakukan pengumpulan data dan informasi di tiap lokasi proyek, yaitu Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara kepada para Narasumber
- Narasumber meliputi perwakilan dari kantor dinas – dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten serta mitra pelaksana program. Sedangkan perwakilan masyarakat meliputi kelompok masyarakat pengolahan dan pemasaran (Poklahsar), kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis), kelompok masyarakat nelayan dan kelompok konservasi.
- James Berdach selaku Konsultan Penyusun PCR mengatakan bahwa secara umum diskusi dengan para narasumber terkait dengan tiga hal, yaitu: Kegiatan dalam proyek, capaian dalam proyek serta tantangan dan cara mengatasi kendala

dalam proyek. Beliau juga menyampaikan bahwa penugasannya juga mencakup laporan TER GEF (Terminal Evaluation Report) dimana perlu sekali hasil Tracking Tool dari tiap-tiap Kawasan konservasi

- Bu Helena, selaku perwakilan ADB berharap kunjungan lapangan ke lokasi proyek dapat berjalan lancar sehingga proses penyusunan laporan juga akan diselesaikan. Adapun lingkup laporan yang akan disusun meliputi periode pelaksanaan proyek pertama yaitu tahun 2013 – 2019 serta fase restrukturisasi, yaitu 2020 – 2023

f. Workshop Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Zonasi serta Status Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Lingga

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 di Tanjung Pinang. Agenda kegiatan ini adalah pemaparan data dan informasi terkait dengan status penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Lingga. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Penambahan zona inti perlu terlebih dahulu didiskusikan dengan nelayan
- Apabila penetapan di ruang 0-12 mil, nelayan kecil akan tersisihkan. Karena di atas 12 mil didominasi dengan kapal besar/ kapal jaring udang hela berkantung
- Kapal jaring udang hela berkantung skala besar sudah sepakat untuk tidak beraktivitas di sekitar kawasan pemanfaatan. Kawasan ini hanya untuk nelayan-nelayan skala kecil
- Terdapat Pulau Ila Kecil dekat dengan Ila Besar yang tidak berpenghuni dan dapat menjadi tambahan zona inti
- Di area antara Pulau Bogai Besar dan



Gambar 5. Foto bersama peserta diskusi

Bogai Kecil diharapkan ada sodetan untuk akses warga karena wilayah berpenghuni

- Perlu ada buffer zone beberapa meter di pantai zona inti dekat pulau yang

berpenghuni untuk akses masyarakat agar tetap bisa beraktivitas beberapa meter ke arah laut

g. Lokakarya Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juli 2023 di Lombok. Agenda kegiatan ini adalah pelatihan mengenai perikanan karang bagi kelompok perikanan dan penyuluh terkait. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Karakteristik perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB):
 1. Produksi perikanan: 208.000 ton
 2. Kapal penangkap ikan: 22.976 unit. 77% dibawah 5GT (didominasi nelayan kecil)

3. Alat tangkap dominan: pancing tonda, tali panjang, dan perangkap
4. Produksi perikanan karang 18%
5. Produksi ikan kakap dan kerapu 5,5% dari total produksi perikanan NTB

- Ancaman Dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan:

1. Tangkap lebih
2. *Illegal Fishing* (penangkapan ikan tanpa izin)



Gambar 6. Peserta lokakarya menyimak penjelasan pemateri

3. *Destructive Fishing* (pengeboman ikan, pengambilan batu karang, potassium, dsb)

- Edukasi dan kampanye untuk perikanan karang berkelanjutan merupakan upaya jangka panjang. Terdapat komponen perubahan perilaku dan sosial ekonomi yang perlu diselesaikan
- Pelatihan sejenis perlu dilakukan lebih lanjut kepada nelayan-nelayan

h. **Workshop Penutupan dan Diseminasi Hasil Proyek COREMAP-CTI ADB**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta. Agenda kegiatan ini adalah penutupan dan diseminasi hasil proyek COREMAP-CTI ADB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- COREMAP-CTI Asian Development Bank yang diimplementasikan oleh Bappenas melalui ICCTF dan kerja sama dengan mitra pelaksana di lapangan sudah menghasilkan beberapa keluaran dan capaian, untuk mendukung model inovasi pembangunan
- Kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait selama hampir tiga tahun pelaksanaan program ini merupakan alasan utama mengapa capaian dan keluaran program tersebut dapat dicapai dengan baik
- Terdapat banyak tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, namun dengan kolaborasi dan partisipasi semua pihak, hal tersebut dapat diatasi. Berbagai

pembelajaran, *success story*, dan model inovasi dari program ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk direplikasi di tempat lain atau melalui program lain

- Salah satu pembelajaran yang didapat dari implementasi COREMAP-CTI Asian Development Bank antara lain adalah penerapan pendekatan *science-based policy* dimana informasi atau data ilmiah yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan dalam perencanaan pengelolaan kawasan dan jenis terancam. Selain itu peluang keberlanjutan dan replikasi di wilayah dan program lain dapat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat atau *community-based implementation* dalam pemanfaatan, pemberdayaan, dan pengawasan sumber daya alam
- Meskipun saat ini pelaksanaan program di lapangan telah selesai, namun masih ada pekerjaan rumah yang membutuhkan komitmen bersama, yaitu memastikan keberlanjutan dari apa yang sudah



Gambar 7. Foto bersama para narasumber dan penerima manfaat

dihasilkan oleh proyek ini agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan dalam jangka waktu panjang

- Komitmen untuk memastikan keberlanjutan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak namun menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat penerima manfaat itu sendiri

2. BLUE CARBON



a. Diskusi Blue Carbon dengan Earth Security

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan peluang kerjasama dalam program M40 yang diinisiasi oleh Earth Security Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Term M40 berasal dari scientific data yang menyatakan bahwa terdapat 40 lokasi di dunia yang memiliki luasan mencapai 70% dari ekosistem mangrove yang mampu menyimpan 2,8 juta ton karbon. Business model ini bertujuan untuk mendukung dan mengidentifikasi provinsi untuk dapat mengembangkan aset SDA
- M40 bertujuan untuk mengidentifikasi, menginkubasi, dan mengakselerasi business model yang melindungi dan merestorasi mangrove, meningkatkan karbon sekuetrasasi, adaptasi pesisir dan pengembangan ekonomi lokal. Adapun program ini dapat memberikan revenue dari “premium” karbon biru yang fokus kepada dampak co-benefit
- Outcome dari program ini terbagi menjadi 3 langkah yaitu: a) investasi 6 pilot project yang bekerjasama dengan NGO lokal untuk inkubasi dan akselerasi investasi business model yaitu “*premium blue carbon*”; b) pemetaan peluang pada 12 provinsi di Indonesia (*regional blueprints*); c) *design* pendanaan M40 pada proyek blue carbon yang dapat berasal baik dari pendanaan publik dan swasta
- 12 Provinsi yang dimaksud antara lain adalah Papua (Jayapura), Irian Jaya Barat (Sorong), Kalimantan Timur (Balikpapan), Maluku (Ambon), Sumatera Selatan, Riau (Dumai), Kalimantan Utara (Tarakan), Kalimantan Barat (Singkawang), Bangka Belitung (Pangkal Pinang), Sulawesi Tenggara (Kendari), Kalimantan Selatan, Kepri (Batam)
- *Business model* dari pengembangan pilot proyek yaitu adalah a) *aquaculture*, b) *green infrastructure*, c) *ecotourism*, d) *agroforestry*, dan e) *blue carbon*. Adapun program ini akan bekerjasama dengan beberapa organisasi (YKAN, YKI, Blue Forest, Wetland International) untuk mengembangkan investasi, potensi karbon biru dan dampak co-benefit, potensial solusi teknologi NBS (MRV), menghubungkan sektor swasta dan ahli dalam meningkatkan business model, dan mengukur dan berkomunikasi terkait nilai ekonomi dampak proyek
- Terdapat 3 komponen yang membutuhkan bantuan ICCTF dalam hal menjalankan program ini yaitu a) *scalability*, b) *legally pathway* dengan pemerintah, dan c) *funding* dan *investment*. Disisi lain, adanya program ini dapat membantu ICCTF dalam pendanaan berkelanjutan untuk program yang sedang dijalankan, Blue Carbon AFD dan Lautra



Gambar 8. Diskusi antara ICCTF dengan Earth Security

- Sebagai tindak lanjut langkah menjalin kerjasama antara ICCTF dan Earth Security terkait M40, maka diusulkan agar Earth security mengirimkan *formal letter* perihal penawaran kolaborasi ke ICCTF untuk dapat diteruskan ke Bappenas

b. Rapat Blue Carbon di Bandung

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 di Bandung. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan Blue Carbon Foundation Course serta diskusi potensi pengembangan kegiatan blue carbon dan blue carbon trading. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Blue carbon terutama seagrass diharapkan dapat dimasukkan ke dalam target 2nd NDC
- Dilihat dari iniasi yang ada, pemangku kunci dalam pergerakan blue carbon antara lain adalah Bappenas (*mainstreaming blue carbon framework* di *National Plan*), Kemenkomarves (koordinasi implementasi karbon biru), KKP (implementasi *blue carbon*), dan KLHK (UNFCCC focal point, pengembangan kebijakan iklim, dan implementasi karbon biru MRV). Namun selain K/L tersebut juga terdapat beberapa pemangku kepentingan lain yang terlibat yaitu BRGM (memimpin program mangrove), BRIN (memimpin riset karbon biru), Kemenkeu (mengelola dana terkait program kehutanan dan kelautan), dan Kemendagri (koordinasi pemerintah subnasional).
- National Summit for Blue Carbon Foundation Course akan dilaksanakan pada 10-12 Oktober 2023 di Labuan Bajo. Peserta yang diundang antara lain 20 peserta Train the Trainers, 3 pelatih dari Blue Praxis, dan ditambah dengan 30 undangan dengan prioritas dari tingkat

Pemerintah Pusat. Untuk field visit perlu diundang *policy makers* pada tingkat direktur dari Kemenkomarves, KKP, KLHK, Kemendagri, dan BRIN. Diusulkan untuk mengundang otoritas keuangan dari Kemenkeu dan OJK untuk memberikan materi perkembangan blue carbon trading di Indonesia.

- Dalam diskusi mengenai Kebijakan Mangrove dan Blue Carbon Foundation Course, harapannya Bappenas tidak hanya berperan untuk *mainstreaming* kerangka karbon biru ke dalam perencanaan nasional, tetapi Bappenas dapat menjadi kelembagaan yang dapat menjadi penanggungjawab program blue carbon secara keseluruhan sampai masuk ke

investasi publik. Pada RPJMN selanjutnya, akan dimasukkan terkait *carbon market*. Sejauh ini negara luar dapat melaksanakan carbon trading karena kuat dengan *private-driven*, sedangkan di Indonesia masih dipelopori oleh *government-driven*

- Dalam diskusi mengenai potensi pengembangan kegiatan blue carbon dan kaitannya dengan program blue carbon AFD, Ibu Direktur Kelautan dan Perikanan menganjurkan perubahan AWP dengan mempersingkat term dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Beliau juga memberikan arahan perlunya analisis kelembagaan sehingga terdapat output rekomendasi mengenai pemberdayaan masyarakat serta perlunya pertimbangan replikasi di lokasi lain jika terdapat dana tambahan.



Gambar 9. Diskusi pembahasan kegiatan Blue Carbon

3. BLUE FINANCE



a. Rapat Pembahasan Kelembagaan ICCTF dan Blue Finance Advisory Committee

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di Ruang Rapat DH-4, Bappenas. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembahasan Kelembagaan ICCTF dan Blue Finance Advisory Committee. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- ICCTF merupakan program strategis untuk membantu tugas dan fungsi Bappenas serta K/L Pemerintah. Oleh sebab itu prinsip keberlanjutannya penting untuk dibahas
- ICCTF sebagai *trust fund* memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada saat ini, ICCTF fokus untuk melaksanakan program Kelautan dan Perikanan, meskipun sebenarnya sudah didorong untuk kembali ke *track* awal yaitu mitigasi berbasis lahan, adaptasi & ketahanan, energi, dan kelautan & perikanan
- ICCTF berbentuk satker sehingga sumber pendanaan yang masuk ke ICCTF perlu mengikuti peraturan-peraturan yang berhubungan dengan APBN. Pada bulan Agustus COREMAP-CTI ADB akan selesai, sehingga proyek yang tersisa adalah LAUTRA dari World Bank dan Blue Carbon dari AFD. Kedua protek tersebut dimasukkan ke dalam ICCTF karena akan mendukung tugas dan fungsi Direktorat Kelautan dan Perikanan serta diimplementasikan melalui skema swakelola.
- Terkait BFAC, Menteri PPN diusulkan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina BFAC atau Ketua Komite Pengarah
- Ibu Deputi KSDA menyampaikan bahwa, salah satu output dari Komite Penasihat ini adalah *Non-Sovereign Bond* untuk program-program Biru
- Perlu dimasukkan UKE dari Kedeputan Ekonomi serta Staf Ahli bidang Sinergi Pembiayaan
- Pertemuan selanjutnya diagendakan pada September 2023



Gambar 10. Penyampaian arahan oleh Sekretaris Kementerian PPN

b. Kunjungan World Bank Mission untuk Pemetaan Potensi Implementasi Pendanaan Inovatif untuk Sektor Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-9 September 2023 di Raja Ampat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi potensi implementasi pendanaan inovatif untuk sektor Kelautan dan Perikanan. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Jumlah wisatawan di Raja Ampat terus meningkat, namun pendanaan dari APBN dan APBD untuk pengelolaan destinasi wisata di Raja Ampat masih terbatas. Dibutuhkan suatu kreasi atau inovasi pendanaan agar sustainable dan tidak tergantung dengan pemerintah
- Permasalahan pengelolaan wisata di Raja Ampat adalah tempat wisata dapat dikunjungi dari berbagai wilayah, sehingga pendataan tidak sinkron dan pemasukan dari biaya tarif masuk menjadi tidak maksimal. Dari semua kendala yang ada, peningkatan tata kelola menjadi kebutuhan utama yang perlu diprioritaskan
- Pendataan wisatawan di Raja Ampat masih tumpang tindih, mengingat berbagai institusi yang mengelola kawasan dan bisa melakukan penarikan tarif, yaitu BKKPN Kupang wilayah Raja Ampat, Dinas Pariwisata, dan BLUD UPTD Raja Ampat sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi.
- Salah satu upaya yang paling signifikan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi di Raja Ampat adalah sistem pengawasan zonasi MPA yang sangat bergantung pada masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang digaji oleh pihak BLUD
- Berdasarkan survey lapangan, kondisi bawah laut di Friwen Walls cukup potensial sebagai salah satu destinasi wisata penyelaman di Raja Ampat. UMKM dan infrastruktur pendukung kegiatan penyelaman juga tersedia di wilayah sekitar, namun masih perlu ditingkatkan



Gambar 11. Survey lapangan di Friwen Walls

c. **World Bank Mission to ICCTF**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Kantor ICCTF dan Bappenas. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan mengenai Coral Bond dan rencana meeting dengan OJK. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Persiapan untuk Proyek Lautra sudah dapat diproses mengingat revisi DIPA

ICCTF sudah diajukan, procurement untuk PIU dan konsultan sudah diproses

- Konsep Coral bond sudah bisa dielaborasi lebih lanjut dan diajukan dengan pendanaan GEF. ICCTF Bappenas perlu mengawal penyusunan surat untuk endorsement ke GEF Focal Point
- Sebagai tindak lanjut ICCTF-Bappenas dan World Bank akan mengajukan ke GEF Focal Point Indonesia untuk NGI di GEF 8



Gambar 12. Diskusi dengan Deputi KSDA, Bappenas

d. Rapat Pembahasan Calon Anggota Blue Finance Advisory Committee

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023 bertempat di Hotel Mandarin, Jakarta. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan keanggotaan pada BFAC. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Tim teknis sudah mulai pendalaman terkait dengan rencana kegiatan terutama kegiatan kegiatan yang bernuansa biru
- Susunan Keanggotaan Komite Pengarah dan Komite Teknis Pendanaan Biru serta tugas dan fungsinya akan diresmikan dalam suatu surat keputusan. Disepakati usulan revisi keanggotaan ditunggu hingga Rabu 20 Sept 2023
- Tindak lanjut dari kegiatan kegiatan yang relevan untuk perkembangan Komite ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari Proyek LAUTRA. Disepakati akan ada rapat lanjutan untuk detail kegiatan
- Dukungan dari Komite Pengarah dan Komite Teknis pendanaan biru untuk proses pengembangan instrument pendanaan biru salah satunya adalah Coral Bond sebagai bagian dari obligasi Non Pemerintah
- Aspek reporting dan pendataan menjadi perhatian khusus bagi anggota BFAC



Gambar 13. Diskusi Pembahasan Calon Anggota BFAC

e. Rapat Component 3 LAUTRA dengan IUCN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14, 15 dan 18 September 2023 bertempat di KKP. Agenda kegiatan ini adalah diskusi teknis pembahasan Komponen 3 LAUTRA. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Define roles dan tanggung jawab IUCN, WB, KKP, ICCTF dan BPDH
- Identifikasi outcome payer: GEF NGI Submission, GEF Focal point endorsement, dan identifikasi outcome payer lainnya
- Project preparation mencakup: Project design (IUCN Green list & Evika Benchmarking, IUCN Green list Threshold Requirement, Define project activities, Project Budget, and Channeling & Implementation modalities); Financial design (Outcome payer, identifikasi of sustainability linked KPIs, Structuring of Payment Schedule, Channeling & Implementation modalities dan Development of Financial prospectus)
- Akan dilakukan workshop sosialisasi terkait dengan konsep CORAL BOND.
- Surat dukungan dari masing masing instansi



Gambar 14. Diskusi teknis pembahasan Komponen 3 LAUTRA

f. Rapat dengan OJK

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 bertempat di Kantor OJK. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan Blue Finance dengan OJK. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Saat ini ICCTF-Bappenas tengah menyusun Blue Finance. Ada dua elemen yakni *Non sovereign* dan *sovereign*
- Untuk Indonesia telah didesain Coral Bond dengan tujuan sebagai pendanaan *non sovereign, non debt financing instrument* untuk pendanaan pengelolaan yang efektif untuk MPA di Indonesia dengan standart IUCN Green list status untuk 3 MPA yang diusulkan dengan total luas sekitar 5,038,898 Ha
- Untuk IUCN Green List terdapat indicator yang di ukur seperti good governance, sound design and planning, effective management
- Terdapat POJK nomor 30 terkait supernational organisation dan juga ada kebijakan terkait dengan keberlanjutan bond dan sukuk. Namun belum ada yang spesifik terkait dengan coral tapi bisa

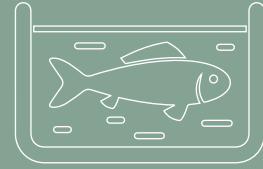
masuk ke Green karena mengcover terkait dengan *Biodiversity*

g. Workshop and Technical Discussion on Coral Bond

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 di hotel Borobudur, Jakarta. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan coral bond sebagai salah satu pendanaan inovatif sektor biru di Indonesia. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Coral Bond dapat menjadi salah satu pendanaan inovatif untuk mendukung sektor biru terutama Kawasan konservasi
- Pengembangan Coral Bond diharapkan tidak menambah hutang negara untuk mendukung pengembangan *non-sovereign financial instruments* dan dapat di replikasi oleh sektor swasta di Indonesia
- Pengembangan *Financial Instruments* yang beresiko rendah baik secara fiskal maupun reputasi negara (*Sovereignty*)
- Pendanaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan dan diakui secara International

4. AQUACULTURE/ISLME



a. **Rapat Procurement ISLME**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 melalui aplikasi Zoom.

Agenda pertemuan ini adalah pembahasan procurement ISLME. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- ICCTF masuk dalam government sehingga masih mengikuti pengadaan lewat APBN termasuk regulasi. Untuk batasan batas pengadaan mengikuti UKPBJ dari Bappenas.
- Daftar kuesioner diisi sebagai UKPBJ. Tujuan kuisisioner ini adalah untuk mengetahui tim atau unit yang melakukan proses pengadaan dari tahap pemilihan sampai kontrak sudah memenuhi standar-satandar yang dari ADB
- Procurement plan akan segera disusun



PROGRAM STRATEGIS, POTENSI KERJASAMA DAN PENGGALANGAN DANA

a. ASEAN Blue Economy Forum 2023 di Belitung

Workshop ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli 2023 di Belitung. Agenda kegiatan workshop ini meliputi kunjungan lapang dan pelaksanaan seminar dengan tema “Enabling Environment for Blue Finance Initiative Indonesia”. Ringkasan hasil kegiatan ini, antara lain sebagai berikut:

Georide dan Georun

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Belitung UNESCO Global Geopark kepada delegasi dari negara-negara ASEAN
- Pengenalan geopark kepada delegasi negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Belitung

Side Event II Working Level Meeting: Enabling Environment for Blue Finance Initiative Indonesia

- Seminar ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi strategi dan praktik terbaik dalam mengembangkan blue finance dari pemangku kepentingan nasional di Indonesia dan lembaga keuangan yang dikenal secara global
- Pemerintah ingin menciptakan regulasi yang tepat untuk inisiatif pendanaan biru di

Indonesia agar dapat dilanjutkan ke skala regional ASEAN. Indonesia mempunyai potensi di Ekonomi Biru dan negara ASEAN lainnya juga memiliki potensi serupa.

- Potensi ekonomi biru dapat digunakan untuk mendukung target SDGs untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan meningkatkan kesejahteraan serta memastikan keberlanjutan dari wilayah laut dan pesisir, mencegah peningkatan polusi dan pencemaran laut serta dijadikan untuk strategi transformasi ekonomi Indonesia.
- Untuk memastikan implementasi pendanaan biru yang komprehensif, maka dibutuhkan kolaborasi *stakeholder*. Pada saat ini masih, Indonesia masih tergantung pada bond/sukuk asing, sehingga instrumen *non-sovereign* juga perlu diterbitkan.
- Pemerintah perlu mengeksplorasi informasi kebutuhan kebijakan, *tools*, dan kerangka kerja untuk menerbitkan pendanaan biru dari Pemerintah dan Swasta. Praktik baik dan strategi penggunaan pendanaan biru perlu dipelajari dari lembaga-lembaga pendanaan Internasional. Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan pemahamannya terhadap bond dan sukuk baik *sovereign* dan *non-sovereign* serta proses penerbitannya.



Gambar 15. Pembukaan seminar oleh Deputi Bidang KSDA Bappenas

Island Hopping

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan keindahan pulau-pulau kecil di Belitung kepada delegasi negara-negara ASEAN
- Selain mengamati keindahan alam pada kegiatan ini juga dilakukan aksi bersih-bersih pulau dari sampah plastik sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan

b. Studi Lapangan Masyarakat Pesisir

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-5 Juli 2023 di Kupang, NTT. Agenda kegiatan ini adalah ini kajian pembahasan fenomena kemiskinan nelayan di masyarakat pesisir dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan. Hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- NTT memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 491 ribu ton per tahun, tetapi sepanjang tahun 2012-2021 baru mampu memanfaatkan <40 % dari potensi tersebut
- Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan nelayan di NTT sebesar 17,96 %. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tingkat

kemiskinan nelayan nasional sebesar 12,04 %.

- Pada tahun 2022, jumlah nelayan di NTT sebanyak 89.000 orang. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari jumlah 10 tahun lalu.
- Tren peningkatan masyarakat yang menjadi nelayan tangkap dapat disikapi dengan dua sudut pandang:
 1. Indikasi bahwa mata pencaharian ini dinilai mampu menunjang keseharian individu dan keluarganya
 2. Masyarakat tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak menjadi nelayan (*barrier to entry* yang kecil)
- Salah satu kemungkinan penyebab angka kemiskinan di nelayan masih tinggi dikarenakan harga hasil tangkapan dihargai sangat rendah oleh tengkulak
- Terkait aspek Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam menurunkan angka kemiskinan nelayan, perlu dilakukan penambahan armada, sarana prasarana, serta industrialisasi perikanan
- Hasil dari studi lapangan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD



Gambar 16. Foto bersama di PPI Desa Oeba, Kupang, NTT

c. Konsultasi Publik Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Zonasi serta Penetapan Zonasi Kawasan Konservasi Natuna

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli di Natuna, Kepulauan Riau. Agenda pertemuan ini adalah konsultasi publik terkait dengan penetapan zonasi Kawasan Konservasi Kabupaten Natuna. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Luas kawasan rencana zonasi Kawasan Konservasi Kabupaten Natuna sebesar 294.414,55 hektare
- Zonasi kawasan meliputi:
 1. Zona inti sebesar 5.968,18 hektare
 2. Zona pemanfaatan terbatas sebesar 290.799,92 hektare
 3. Zona lainnya sebesar 916,45 hektare
- Menanggapi rencana zonasi Kawasan Konservasi yang sudah disusun, dilakukan perubahan (revisi) dalam hal penamaan pulau dan deliniasi
- Perwakilan Kelompok Masyarakat menyatakan pemanfaatan Kawasan

Konservasi harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, termasuk Kelompok Nelayan secara berkeadilan

d. Workshop Finalisasi Draft Rencana Zonasi Serta Status Penetapan 3 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Prioritas Kepulauan Riau

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3-5 Agustus 2023 di Batam. Agenda kegiatan ini adalah pemaparan hasil pengembangan peta draft rencana zonasi 3 KKD Prov Kepulauan Riau. Kesimpulan dan tindak lanjut hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Perlu penyempurnaan dari zona kawasan konservasi dari Batam, Lingga, dan Natuna yang akan difinalisasi oleh DKP Kepri dan Pemda setempat dengan informasi-informasi terbaru yang didapat dari stakeholders terkait.
- Perlu detail rencana pengelolaan yang akan mendukung pemanfaatan dari zona konservasi yang ditetapkan.
- Perlu koordinasi antar stakeholder yang berkepentingan untuk mengupdate

informasi yang diperlukan dalam penetapan zona konservasi yang akan disahkan.

- Tim Pokja DKP Provinsi diharapkan dapat melanjutkan finalisasi dokumen rencana zonasi untuk ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 17. Penandatanganan dokumen bersama stakeholder terkait

e. **Pelatihan dan SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Level Teknisi**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-11 Agustus 2023 di Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari SDM lembaga pemerintah terkait, baik yang berada di level provinsi maupun kabupaten, dalam perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan sertifikasi profesi kepada SDM tersebut sehingga memiliki standar kompetensi yang diakui secara profesional. Berdasarkan hasil pelatihan dan pelaksanaan sertifikasi SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Level Teknisi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Seluruh peserta telah mengikuti jam pelajaran yang diberikan dan mendapatkan sertifikat pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Level 5
- Hasil pre dan post tes menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sehingga secara umum para peserta pelatihan memahami materi yang telah di sampaikan
- Berdasarkan sertifikasi yang telah dilakukan, 29 dari 30 orang peserta direkomendasikan “Kompeten” oleh LSP Konservasi dan Jasa Kelautan



Gambar 18. Foto bersama asesor dan asesi setelah menyelesaikan ujian sertifikasi

f. Pelatihan dan SK3 Penilai Terumbu Karang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3-12 September 2023 di labuan Bajo, NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari SDM lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten, dalam penilai kondisi terumbu karang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan sertifikasi profesi kepada SDM tersebut sehingga memiliki standar kompetensi yang diakui secara professional. Berdasarkan hasil pelatihan yang dilakukan terkait dengan Penilaian Kondisi Terumbu Karang selama 5 hari pelatihan dan pelaksanaan sertifikasi SK3 Penilai Kondisi terumbu karang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Telah tercapai jumlah jam Pelajaran dan materi modul tersampaikan kepada seluruh peserta pelatihan.
- Hasil pre dan post tes menunjukkan bahwa secara umum semua peserta pelatihan telah memahami materi yang telah di sampaikan
- 12 peserta pelatihan telah direkomendasikan untuk lanjut ke sertifikasi penilai kondisi terumbu karang
- Semua peserta telah di rekomendasikan “Kompeten” dengan hasil keputusan resmi akan disampaiakn oleh LSP setelah dilakukan oengkajian berkas/dokumen asesi.

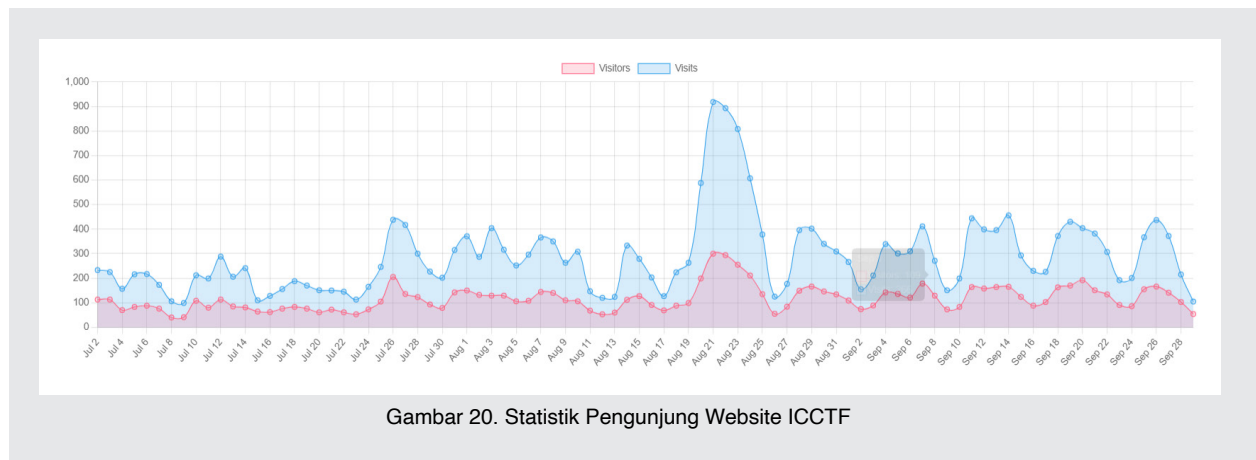


Gambar 19. Penjelasan sertifikasi oleh asesor kepada para asesi yang telah dibagi kedalam beberapa grup

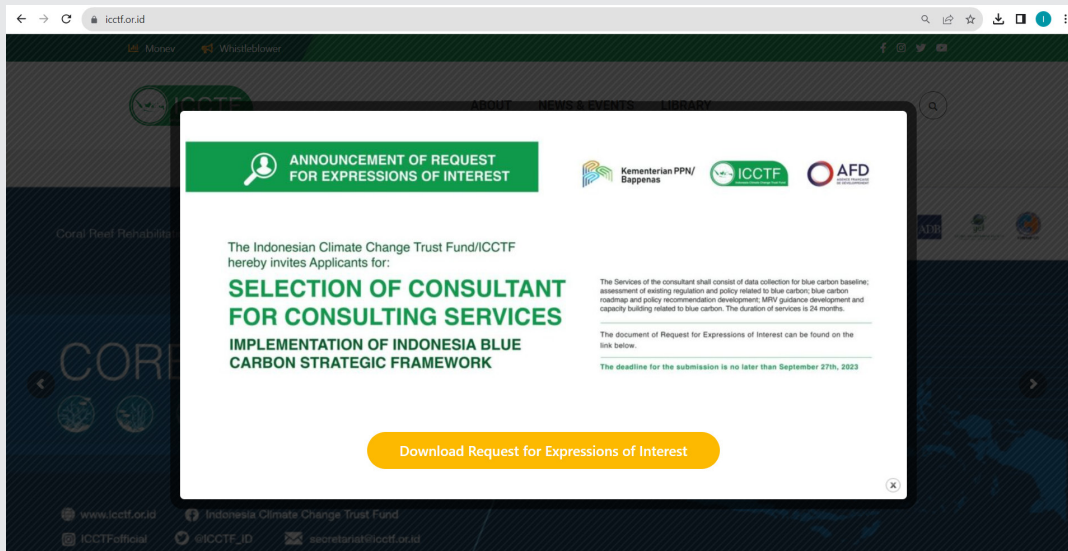
Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas.

ICCTF saat ini lebih banyak melakukan strategi pendekatan komunikasi secara digital karena dinilai lebih interaktif dan *realtime* melalui pengelolaan website (<https://www.icctf.or.id/>) dan beberapa akun media sosial yang terdiri dari: Instagram (@icctfofficial); Twitter (@ICCTF_ID); Facebook (IndonesiaClimateChangeTrustFund) dan Youtube (ICCTF Official). ICCTF senantiasa berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia tersebut dengan mempublikasikan informasi dan foto-foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana.

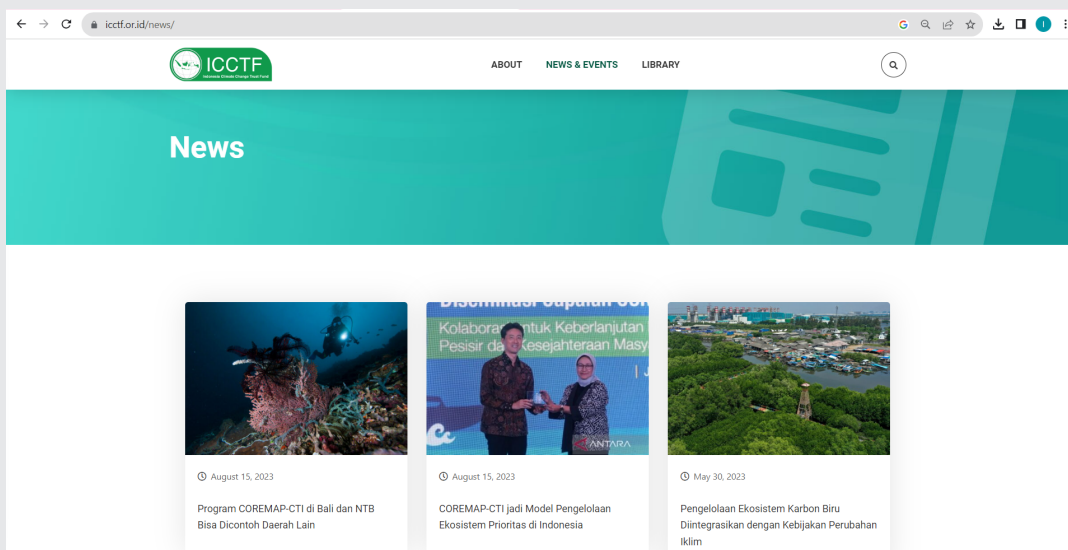
1. Portofolio Website dan Media Sosial ICCTF pada Triwulan Kedua Tahun 2023



Gambar 20. Statistik Pengunjung Website ICCTF



Gambar 20. Statistik Pengunjung Website ICCTF



Gambar 20. Statistik Pengunjung Website ICCTF

2. Pemantauan Hasil Publikasi Media Kegiatan Kick-Off Meeting Blue Carbon Project: Integrasi Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia

Tabel 1. Daftar Publikasi Media pada Kegiatan Kick-Off Meeting Blue Carbon Project

No.	Tanggal	Media	Judul	Link
1	15/08/2023	KOMPAS.id	Program COREMAP-CTI di Bali dan NTB Bisa Dicontoh Daerah Lain	https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/15/program-coremap-cti-di-bali-dan-ntb-bisa-dicontoh-daerah-lain
2	15/08/2023	AntaraNews	COREMAP-CTI jadi Model Pengelolaan Ekosistem Prioritas di Indonesia	https://www.antaraneews.com/berita/3682380/coremap-cti-jadi-model-pengelolaan-ekosistem-prioritas-di-indonesia



3

AUDIT, KEUANGAN Dan OPERASIONAL

A. Audit BPK Tahun 2023

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2023 ini BPK telah mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2022 juga telah selesai diaudit oleh BPK Audit Khusus di tahun 2023. Menurut Opini BPK, laporan keuangan telah disajikan secara wajar baik dalam hal material, sumber dan penggunaan dana, penerimaan dan pengeluaran, pembiayaan dan pengeluaran kumulatif, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

B. Informasi Keuangan Periode Juli - September 2023

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai. Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik.

Pada tahun 2023 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 12M dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 14,4M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2023 adalah 26,4M. Capaian pada kuartal 3 tahun 2023 adalah sebesar 18,15M yaitu 68,78% dari total dana yang dikelola (**Table 2**).

Tabel 2. Rincian alokasi dana pada Satker ICCTF Periode April - Juni Tahun 2023

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan	Sisa Anggaran	
APBN - ICCTF	12.000.000.000	4.968.774.766	41,40%	7.031.225.234
Hibah – ADB (Reksus)	14.400.000.000	13.188.972.297	91,59%	1.211.027.703
TOTAL	26.400.000.000	18.157.747.063	68,78%	8.242.252.937

C. Operasional / Kesekretariatan

Kegiatan-kegiatan Sekretariat ICCTF yang dilaksanakan sepanjang triwulan ketiga tahun 2023, antara lain:

a. Rapat Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran PPK Kementerian PPN/Bappenas Triwulan II 2023

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juli di Bogor. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan laporan perkembangan pelaksanaan program ICCTF. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Pagu awal 12 M, pada triwulan ketiga mendapat tambahan dari ADB yang merupakan handover dari tahun 2022
- Untuk pelaksanaan, penyerapan per bulan Juni 47%, khusus untuk COREMAP-CTI ADB realisasi mencapai 58%. Terkendala dengan teknis pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran sedikit terhambat. Rencana

penarikan di bulan Agustus sekitar 60%. Dengan adanya project closing ADB diharapkan ada peningkatan yang signifikan di bulan Agustus

- Terkait Rupiah Murni, penyusunan kajian neraca sumber daya masih melalui proses lelang di sekitar Timika dan Maluku (WPP718). Sekitar September baru bisa dikontrak, termin pertama di bulan September atau Oktober. Di Triwulan III diharapkan sudah bisa di SP2D kan
- Terkait AFD, belum ada alokasinya di DIPA karena merupakan hibah langsung. Proses pencantumannya di DIPA setelah ada belanja sehingga belum dimasukkan di DIPA awal. Pencatatan hibah AFD sempat mengalami kendala karena kurs. Perlu dicari solusi terbaik untuk pencatatan nilai kurs agar tidak ada kendala dalam laporan keuangan
- Terkait UP, tidak ada kendala setiap bulan sesuai jadwal. Namun untuk TUP ada sedikit kendala dalam pengumpulan pertanggung jawaban karena kegiatan yang sangat padat



Gambar 23. Pembahasan perkembangan pelaksanaan program ICCTF

b. Workshop Evaluasi Laporan Keuangan dan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2023. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan implementasi pengendalian intern atas Laporan Keuangan yang memadai untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas TA 2023. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Tabel A dibuat untuk akun signifikan dari pengalaman transaksi yang sudah terjadi untuk memitigasi resiko di masa depan, sumbernya dari Temuan BPK dan APIP
- Tabel A disusun berdasarkan pengalaman transaksi yang sudah dilakukan, yang diinput adalah transaksi utama yang penting (tidak semua proses transaksi)
- Tabel A akan dilaporkan minimal 1 kali dalam satu tahun periode Pelaporan Keuangan Satuan Kerja
- Tabel A akan dipersiapkan oleh setiap satuan kerja dekonsentrasi dan akan dibuatkan rekapitulasi oleh Satker Bappenas untuk dilaporkan kepada APIP
- Matrik Tabel A diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum jkegagalan tersebut memiliki pengaruh material terhadap tujuan proses bisnis



Gambar 24. Pembukaan kegiatan oleh Kepala Biro Umum Bappenas

c. Rapat Koordinasi Penyelesaian Administrasi Hibah dan Pembahasan Per-91P812022 untuk Kegiatan Satker MWA ICCTF

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 di Bekasi. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan mengenai dana hibah yang dikelola ICCTF. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Penyelesaian administrasi hibah luar negeri terutama COREMAP-CTI harus diselesaikan dengan tenggang waktu yang disediakan
- Untuk langkah berakhirnya dana hibah ADB yaitu, Pengakhiran project - Refund Saldo Reksus dan Ineligible - Penutupan Reksus
- Hibah blue carbon AFD terdapat alokasi pendanaan 620,000 EUR dengan durasi proyek selama 3 tahun (36 bulan). Memakai kurs Euro karena dari AFD Prancis
- Mengenai Per-91P812022 pencatatan dana hibah berbentuk valas, latar belakang mengapa adanya Per-9 karena adanya amanat pasal 11 sistem akuntansi hibah atau sikuba. Uang berbentuk valas belum bisa pembukuan di SAKTI, SPHL, SP2L. Sebagai salah satu solusi bisa menggunakan metode FIFO untuk valasnya. Kurs yg digunakan tetap KTBI
- Untuk hibah LAUTRA, dana bersumber dari Pro-blue sebesar 5 juta USD dengan durasi 2.5 tahun. Koordinasi Revisi Tambahan Anggaran Rupiah Murni total alokasinya Rp 1.3 M



Gambar 25. Diskusi kegiatan Satker MWA ICCTF

LAPORAN 3 TRIWULAN 2023

